

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(RLPPD) KOTA CIREBON

TAHUN 2024

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Cirebon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja 2024 (%)	Perubahan (%)
			2024 (%)	(%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75.25	0.85	0.4%
2	Angka Kemiskinan	10.03	-2.094	-0.21%
3	Angka Pengangguran	10.53	4.179	0.44
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.01	5.02	0.01
5	Pengeluaran Per Kapita	12.506.000	12.869.000	363
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.468	0.424	-0.004

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77.53	77.6977.69
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	100
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	124.09	100.26
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	92.40	99.68

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebesar Rp373,798,833,414,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dealapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dengan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Pendidikan

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di kota Cirebon diantaranya :

- Pada masa PPDB terkait rombel ada masalah kelebihan dan kekurangan kuota
- Data dapodik kadang tidak diperbarui
- Perhitungan anggaran berdasarkan pada anggaran yang tersedia bukan pada data

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.34	4.02
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95.13	98.96

4.	Percentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94.67	98.76
5.	Percentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.37	99.45
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95.76	74.68
7.	Percentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.34	97.14
8.	Percentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96.63	85.29
9.	Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92.70	78.92
10	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.68	99.95
11.	Percentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.90	99.95
12	Percentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	148.22	100
13.	Percentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14.	Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	159.41	100

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebesar Rp575,131,886,618,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemenuhan upaya kesehatan masyarakat perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di kota Cirebon diantaranya :

- Masih adanya perbedaan data disistim informasi kesehatan jiwa dengan data manual
- Ketersediaan obat Jiwa dari pusat terbatas
- Ada kegiatan terkait SPM Urusan Kesehatan yang anggarannya masuk pada anggaran perangkat daerah lain

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	98.73
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	19.61
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	13.13	0
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	0	83.66

	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0	97.12
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	0	100
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	93.82	94.34
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	10.08
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	100

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebesar Rp77,013,805,614,- (Tujuh puluh tujuh miliar tiga belas juta delapan ratus lima ribu enam ratus empat belas Rupiah) dengan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program pengelolaan sumber daya air
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional
- Program pengelolaan sistem air limbah
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- Program penataan bangunan gedung
- Program penataan bangunan dan lingkungannya
- Program penyelenggaraan jalan

- Program pengembangan jasa konstruksi
- Program Penyelenggaraan penataan ruang
- Program penataan tanah

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di kota Cirebon diantaranya :

- Belum adanya kegiatan pendataan akses air minum limbah domestik
- Belum melakukan penerapan SSK dan RISPALD

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0
2.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0.0024	10.06
3.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.52	4.05
4.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	25.98	10.21

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebesar Rp19,049,379,480,- (Sembilan belas miliar empat puluh

sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dengan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program pengembangan perumahan
- Program kawasan permukiman
- Program peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di kota Cirebon diantaranya :

- Belum adanya identifikasi lahan potensial sebagai lahan perumahan
- Anggaran terbatas

D. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	252.121	100
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	108.2	100
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	95.68
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11.95	9.72

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentramna dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja Urusan Ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebesar Rp30,797,723,026,- (Tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh enam Rupiah) dengan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program penanggulangan bencana
- Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- Program ketentraman dan ketertiban umum

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan ketertiban umum di kota Cirebon diantaranya :

- Data reakpitulasi jumlah warga negara yang berada pada zona penegakan perda sulit untuk dihitung
- Penghitungan target masih sulit karena didasarkan *by name by address*
- Anggaran yang terbatas

D. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Sosial yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100

2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100
----	---	-----	-----

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Cirebon pada Tahun 2024 sebesar Rp9,758,215,772,- (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan Program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program penanggulangan bencana
- Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- Program ketentraman dan ketertiban umum

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Sosial di kota Cirebon diantaranya :

- Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan bencana dan kurangnya SDM Tagana
- Harga belanja barang untuk bufferstock sering tidak sesuai dengan harga di pasar
- Belum adanya data secara rinci
- Penyadang cacat masih diabaikan sebagai tenaga kerja di perusahaan
- Belum adanya rumah singgah

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kementrian Dalam Negeri pada Tahun 2023 belum mengeluarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga capaian untuk EPPD tidak dapat disajikan

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 46 B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 Kota Cirebon berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2023, sementara untuk Tahun 2024 masih dalam proses Audit. Pemerintah Kota Cirebon sampai dengan Tahun 2023 telah 8 (delapan) kali mendapat predikat WTP.

No.	Tahun	Predikat
1	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11	2024	??

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon *Unaudited* Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kota Cirebon Tahun 2024 mencapai Rp. 1.637.782.303.140,-(Satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu seratus empat puluh rupiah) dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 mencapai 1.554.837.161.527,- (Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.637.782.303.140,00	1.554.837.161.527,00	94,94
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	653.938.370.148,00	559.033.085.899,00	85,49
4.1.01	Pajak Daerah	281.507.565.359,00	226.058.293.884,00	80,30
4.1.02	Retribusi Daerah	329.481.994.624,00	317.053.093.456,00	96,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.900.000.000,00	8.570.399.813,00	53,90
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.048.810.165,00	7.351.298.746,00	27,18
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	653.938.370.148,00	559.033.085.899,00	85,49
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	982.990.850.992,00	991.867.548.844,00	100,90
4.2.01.01	Dana Perimbangan	859.697.048.000,00	872.744.168.801,00	101,52
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.316.695.000,00	83.686.065.000,00	136,48
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	605.434.282.000,00	606.158.280.000,00	100,12
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.427.211.000,00	28.244.349.486,00	95,98
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	163.518.860.000,00	154.655.474.315,00	94,58
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGA	859.697.048.000,00	872.744.168.801,00	101,52
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAN PUSA	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.293.802.992,00	119.123.380.043,00	96,62
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	107.125.310.671,00	103.270.333.234,00	96,40
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.168.492.321,00	15.853.046.809,00	98,05
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	123.293.802.992,00	119.123.380.043,00	96,62
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	982.990.850.992,00	991.867.548.844,00	100,90
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45
4.3.01	Pendapatan Hibah	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45
	JUMLAH PENDAPATAN	1.637.782.303.140,00	1.554.837.161.527,00	94,94

5. Inovasi Daerah

Berdasarkan data pada Pemerintah Kota Cirebon memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Ket
1.	DKP3	MEGAH TINGTING LUR (Mari Cegah Stunting dengan Pemberian Telur)	
2.	Dinas Kesehatan	PANTAU SI DIA (Pemantauan Penyakit Tidak Menular Hipertensi dan Diabetes Melitus Oleh Kader Kesehatan)	
3.		SAYONARA TB (Semua Ayo beRantas tunTas Tuberkulosis)	
4.		SI ANAK EMAS (digitalisaSI pelayANAn reKam mEdis puskesMAS)	
5		JEJAK CINTA (Jejaring, Jemput dan Ajak Ibu Hamil ANC rutin untuk Cegah Kematian Ibu, Bayi dan Balita)	
6		JARI MANIS (JAga diRI MengAtasi Hipertensi Pada ProlaNIS)	
7		SAE TBC Larangan (Sembuh Aman Edukatif dari Tuberkulosis)	
8		Mari Ceria (Remaja Putri Cerdas Tanpa Anemia)	
9		GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan ObAT)	
10			
11		GEMMES (Gerakan Mencegah dan Menangani Stunting)	
12		Si Kumbang Madu (Program ini memberikan stimulasi tumbuh kembang untuk ibu hamil dan anak balita dalam penurunan stunting melalui kegiatan yang melibatkan ibu PKK)	
13		CIKAL (Cipta Karsa Literasi)	
14	DPUKMPP	MALL UKM (Melayani Anda Lewat Layanan Usaha Kecil dan Menengah) Kota Cirebon	
15	DKIS	Festival Milm Kampung (Ciptakan Karya Kreatif dan Kearifan Lokal)	
16	Disbupar	Kemis Nyerbon (Upaya Pelestarian Budaya Cirebon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota)	
17		Sistem Informasi Geografis Bencana Kota Udang (SIGENTONG)	
18	DLH	Gerakan Cirebon Minim Sampah (GERIMIS)	
19	Setda	Inovasi Maskot Rang3R Boy untuk Mengkampanyekan Gerakan Cinta Lingkungan di SMPN 7 Cirebon	
20		BUKU SAKTI (Buku Saku Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi)	

21

BUKTI PRESTASI (Buku Sakti Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Terintegrasi)

22

PINTAR BER-AKHLAK (Pedoman Instruksi
Penerapan Budaya Kerja Ber-AKHLAK)

